

BAB III

ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK ATAS PENEMPATAN THAAD 2016-2017

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai pola hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, diketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol telah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan atas penurunan intensitas pada hubungan keduanya dan yang paling terasa yakni setelah adanya peristiwa krisis finansial tahun 1997. Pada bab sebelumnya juga dapat dilihat bagaimana kondisi dan respon pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menanggapi adanya sanksi yang diterapkan oleh Tiongkok atas penolakannya terhadap penempatan THAAD. Sehingga dalam bab ini penulis akan menganalisis hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Penulis akan membagi pembahasan menjadi 3 sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Sub-bab kedua akan membahas mengenai karakteristik dari konsep *state-business relations*. Sub-bab ketiga akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan sanksi atas penempatan THAAD antara Korea Selatan dengan Tiongkok.

3.1 Lobi pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Lotte Group

Dalam konsep *State-Business Relations* terdapat istilah *lobbying* atau melobi. Aktivitas melobi ini dilakukan pada setiap pemerintahan, baik otoriter ataupun demokratis, dan oleh beberapa aktor. Pada pemerintahan, aktivitas ini sering disebut dengan diplomasi. Aktivitas ini dijalankan dengan metode yang beragam dengan tujuan mencapai lingkungan yang menguntungkan bagi pemerintah dan apa yang menjadi kepentingannya dapat terpenuhi. Pada perusahaan aktivitas melobi dilakukan untuk mempengaruhi otoritas pemerintah dalam mempertimbangkan pandangan dan kepentingan pribadi pada saat memutuskan kepentingan publik dan membuat peraturan tentangnya. Sama halnya dengan pemerintah, aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan bagi pihak bisnis dan merupakan bagian dari strategi perusahaan bisnis untuk kepentingan komersial. Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penempatan THAAD ini, pemerintah Korea Selatan dan Chaebol telah melakukan aktivitas melobi. Berikut ini adalah aktivitas melobi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Chabeol;

3.2.1 Lobi pemerintah Korea Selatan kepada Lotte Group

Pemerintah Korea Selatan diketahui telah melakukan lobi kepada Lotte Group pada saat merencanakan penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Lobi yang dilakukan oleh pemerintah ini memiliki tujuan agar Lotte Group bersedia melakukan *Land-Swap* atau menukarkan lahan golfnya yang berada di wilayah Seongju untuk digunakan menjadi lokasi penempatan THAAD. Pemerintah Korea Selatan berusaha

untuk melakukan lobi ini karena lahan di wilayah Seongsan-ri yang seharusnya menjadi lokasi awal penempatan THAAD dinilai kurang aman oleh militer Amerika. Hal ini karena lokasi di Seongsan-ri hanya berjarak sekitar 1,5 km dari wilayah pemukiman warga, sehingga dapat membahayakan warga setempat karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar (Ahn, 2016). Oleh sebab itu, kementerian pertahanan Korea Selatan dibantu oleh militer Amerika bergegas mencari lokasi yang dirasa aman dan strategis. Pada akhirnya, keduanya berhasil menemukan lokasi tersebut yang ternyata adalah lahan golf milik Lotte Group di wilayah Seongju. Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan Ryu Ju-Seung menyatakan bahwa wilayah Seongju terpilih untuk dijadikan lokasi penempatan THAAD karena dapat memaksimalkan keefektifan sistem tersebut dan juga telah memenuhi standar lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (CBS News, 2016).

Menanggapi lobi yang dilakukan pemerintah Korea Selatan, Lotte Group mengalami dilema karena dihadapkan dengan pilihan sulit. Apabila Lotte Group memutuskan untuk menyetujui kesepakatan penukaran lahan dengan pemerintah, maka hal ini akan membahayakan posisi pasarnya di Tiongkok. Namun disisi lain, perlu diketahui bahwa pada saat itu juga ketua Lotte Group yakni Shin Dong-bin sedang berada dalam masalah dimana dirinya dituduh melakukan penggelapan dan pelanggaran kepercayaan bernilai jutaan dolar AS, selain itu Lotte Group juga sedang mengalami masalah dimana terdapat beberapa lisensi toko bebas bea miliknya yang ditahan karena diduga terlibat dalam skandal kasus korupsi yakni menyumbang jutaan

dolar ke yayasan yang dikendalikan oleh Choi Soon-sil yang merupakan orang kepercayaan Park Geun-hye (Xinhua, 2017).

Melihat kondisi yang seperti ini, pada tanggal 28 Februari 2017 dewan pihak Lotte Group memutuskan untuk memilih menandatangani perjanjian pertukaran lahan secara resmi bersama dengan militer Korea Selatan, seperti yang dikutip oleh Mail Online;

"We received a message that the board approved the exchange of land for THAAD deployment," (AFP, 2017)

Dengan kesepakatan ini, maka Lotte Group telah setuju untuk menyerahkan lahan golfnya yang senilai US\$79 juta atau 89 milyar won diganti dengan properti milik militer Korea Selatan yang berada di Namyangju, provinsi Gyeonggi (Choi, 2017).

Pembahasan mengenai lobi pemerintah Korea Selatan kepada Lotte Group ini, terdapat sesuatu yang menarik. Telah beredar kabar bahwa berselang sehari sebelum Lotte Group menandatangani perjanjian pertukaran lahan tersebut, surat perintah atas penangkapan ketua Lotte Group Shin Dong-bin telah dibatalkan oleh pengadilan Seoul. Selain itu, Lotte Group juga diketahui kembali mendapatkan lisensi toko bebas bea miliknya meskipun terlibat dalam skandal korupsi yang menyebabkan impeachment Presiden Park Geun-hye (Xinhua, 2017). Beredarnya kabar ini membuat banyak warga Korea Selatan berasumsi bahwa adanya kesepakatan pertukaran lahan antara pemerintah Korea Selatan dengan Lotte Group dilakukan sebagai imbalan untuk mengembalikan lisensi toko bebas bea milik Lotte Group. Selain itu juga terdapat asumsi warga bahwa pertukaran itu disetujui agar menghentikan penangkapan CEO Lotte Group Shin Dong-bin.

3.2.2 Lobi Lotte Group kepada pemerintah Korea Selatan

Melihat keadaan perusahaannya di Tiongkok yang tidak kunjung membaik karena adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan dan usaha pendekatannya dengan pihak Tiongkok yang tidak pernah berhasil, membuat para eksekutif Lotte Group memutuskan untuk mengadakan pertemuan pada Maret 2017. Dalam pertemuan eksekutif Lotte Group tersebut, dibahas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi Lotte Group di Tiongkok pasca penerapan sanksi atas penempatan THAAD, selain itu para eksekutif juga mencari cara untuk mempertahankan perusahaannya yang berada di Tiongkok dan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hasil dari pertemuan ini, para eksekutif Lotte Group menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri dan memutuskan akan melobi pemerintah Korea Selatan secara resmi agar dapat membantu pihaknya (Mullen & Han, 2017).

Para eksekutif Lotte Group memutuskan melobi pemerintah untuk melakukan intervensi permasalahan ini secara diplomatik, perdagangan dan industri (Sohn I. , 2017). Selain itu Lotte Group menginginkan pemerintah untuk membantu menjelaskan kepada Tiongkok bahwa keputusannya untuk menandatangani kesepakatan penukaran lahan untuk penempatan THAAD dilakukan atas permintaan pemerintah dan merupakan upaya dalam menjaga keamanan nasional. Lotte Group juga menginginkan pemerintah untuk mengingatkan pihak Tiongkok mengenai kontribusinya selama ini terhadap ekonomi Tiongkok, termasuk Lotte Group yang telah memperkerjakan hampir 20 ribu pekerja Tiongkok. Keputusan Lotte Group melobi pemerintah ini

merupakan upaya yang dilakukan pihaknya untuk mencari bantuan pemerintah dan hal ini bukan hanya untuk pihaknya sendiri saja tetapi juga untuk perusahaan Korea Selatan lainnya yang ikut merasakan dampak dari sanksi yang dilakukan Tiongkok atas penempatan THAAD (KBS World, 2017). Dengan lobi yang dilakukan Lotte Group kepada pemerintah Korea Selatan ini, diharapkan dapat mengembalikan keadaan pasar Lotte Group dan perusahaan lainnya di Tiongkok seperti sedia kala.

Pemerintah Korea Selatan selama ini telah berusaha membantu pihak bisnis dengan mencoba berdialog dengan pihak Tiongkok, namun upaya ini rupanya belum juga berhasil. Sehingga untuk membantu meringankan dan mengurangi beban Chaebol, pada September 2017 pemerintahan Moon Jae-in mengambil keputusan yakni rencana untuk memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, seperti yang dikutip oleh reuters;

“The government may announce additional measures to ease the pain later on, but it would be unrealistic to expect relief for a specific company,” (Kim & Jin, 2017)

Pemerintah berencana akan menawarkan konsesi pajak dan memberikan pinjaman. Selain itu pemerintah berencana untuk mengizinkan perusahaan yang beroperasi di Tiongkok untuk menanggungkan semua atau sebagian dari pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan mereka hingga sembilan bulan kedepan (Kim & Jin, 2017). Tidak hanya itu saja, pemerintah juga telah meningkatkan dana kebijakan bank sebesar US\$437,14 juta atau setara dengan 500 milyar won untuk membantu perusahaan yang terkena dampak, namun untuk Lotte Group sendiri bantuan ini

ditiadakan. Dana tersebut akan lebih diarahkan kepada perusahaan yang menjadi pemasok dan pembuat komponen mobil yang bergantung pada penjualan Hyundai dan Kia motor. Hal ini karena penjualan Hyundai Motor Co. telah mengalami penurunan pada pasar mobilnya di Tiongkok sebesar 29%, sehingga pemerintah tidak ingin perusahaan pembuat komponen ikut berlarut terkena dampaknya (Kim C. , 2017).

3.2 Karakteristik *State-Business Relations*

Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintahan Moon Jae-in kepada pihak Chaebol untuk membantu meringankan beban karena adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD. Untuk itu penulis akan melihat kesesuaian antara hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam menyelesaikan permasalahan THAAD dengan konsep *State-Business Relations*. Dalam sub-bab ini, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan karakteristik *State-Business Relations* untuk melihat kesesuaian penyelesaian masalah dengan konsep yang digunakan. Berikut ini adalah analisis permasalahan menggunakan karakteristik *State-Business Relations*;

3.2.1 Transparansi

Dalam hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan bisnis, dibutuhkan adanya transparansi. Transparansi disini merupakan adanya pertukaran informasi yang akurat dan terpercaya antara pemerintah dan Chaebol. Dengan adanya transparansi antara

pemerintah dan Chaebol maka diharapkan dapat membantu memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan Chaebol dapat terpenuhi dengan adanya tindakan ataupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sen, 2015, p. 11).

Pada kasus hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini, transparansi informasi telah diberikan Chaebol kepada pihak pemerintah Korea Selatan. Pihak Chaebol, terutama Lotte Group telah melaporkan bagaimana dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD ini sangat berpengaruh pada perusahaannya dan perusahaan Korea Selatan lainnya yang berada di Tiongkok. Lotte Group melaporkan bahwa telah terjadi penurunan tajam pada penjualannya, bahkan Lotte Group diharuskan untuk menutup 74 gerainya dengan berbagai alasan yang diberikan oleh pihak Tiongkok.

Adanya transparansi informasi yang diberikan oleh pihak Chaebol ini telah membantu pemerintah Korea Selatan untuk menetapkan keputusan apa yang sesuai dengan kebutuhan pihak Chaebol. Melihat banyak perusahaan Korea Selatan yang mengalami penurunan pada pasarnya di Tiongkok akibat adanya sanksi, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk membantu dengan memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang terkena dampak. Pemerintah telah menawarkan konsesi pajak dan memberikan pinjaman, selain itu pemerintah juga berencana untuk mengizinkan perusahaan yang beroperasi di Tiongkok untuk menanggungkan semua atau sebagian dari pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan mereka hingga sembilan bulan.

3.2.2 Timbal Balik

Timbal balik merupakan elemen yang penting dalam hubungan negara dan bisnis. Apabila terdapat bantuan atau subsidi yang diberikan pemerintah kepada sektor bisnis, maka pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa sektor bisnis yang mendapatkan bantuan tersebut mampu menggunakannya dengan produktif dan akan menghasilkan timbal balik yang baik (Sen, 2015, p. 10).

Keputusan Presiden Moon Jae-in untuk membantu Chaebol dalam menghadapi masalah sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD merupakan sesuatu yang cukup menyita perhatian. Hal ini karena sejak masa kampanye, Moon Jae-in telah berjanji untuk mereformasi tata kelola Chaebol dan menghapuskan hubungan kolusi antara politik dan bisnis. Janji Moon Jae-in ini juga disampaikan dalam pengukuhan di Majelis Nasional Korea Selatan pada 10 Mei 2017, seperti yang dikutip oleh the Diplomat;

“Under the Moon Jae-in government, politics-business connections will disappear... I will lead [the] reform of chaebol.” (Fensom, 2017)

Dengan adanya janji Moon Jae-in untuk mereformasi Chaebol tersebut, terdapat banyak pihak merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintahan Moon Jae-in pada Chaebol untuk menghadapi masalah sanksi Tiongkok merupakan hal yang tidak sesuai dengan janjinya.

Menanggapi permasalahan ini, seorang kritikus mengatakan bahwa janji Moon Jae-in mengenai reformasi yang akan ia terapkan pada Chaebol telah dikesampingkan,

hal ini karena pemerintah memfokuskan perhatiannya pada perdamaian dengan Korea Utara, seperti yang dikutip oleh CNBC;

"President Moon is dependent on chaebols for economic cooperation between the two Koreas so given the circumstances, I don't think it's realistic to expect any fundamental reform of chaebols," - Sangin Park (Chandran, 2018)

Kerjasama ekonomi adalah elemen utama untuk menerapkan inisiatif perdamaian dengan Korea Utara dan Chaebol memainkan peranan yang penting dalam bidang tersebut. Investasi dari Chaebol akan sangat penting untuk membangun hubungan transportasi antar Korea dan revitalisasi kawasan industri di wilayah perbatasan Kaesong (Chandran, 2018).

Selain untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, Chaebol juga berpotensi memiliki peran signifikan untuk meremajakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang masih sangat kurang, karena terbukti tingkat pengangguran mencapai tingkat tertinggi selama satu dekade pada bulan Agustus lalu. Dengan peranan yang dimiliki Chaebol untuk berhubungan dengan Korea Utara dan membantu meningkatkan lapangan pekerjaan ini, maka sangat mungkin Presiden Moon Jae-in saat ini melihat Chaebol bukan sebagai subjek reformasi, tetapi sebagai mitra yang sangat diperlukan (Chandran, 2018).

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Chaebol pasca adanya sanksi Tiongkok bukanlah tanpa alasan. Pemerintah mengharapkan adanya timbal balik dari adanya bantuan tersebut yaitu peranan Chaebol untuk ikut berinvestasi di Korea Utara dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah merasa bahwa peranan Chaebol sangat

diperlukan sebagai mitra untuk mencapai inisiatif Presiden Moon Jae-in dalam membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

3.2.3 Menjaga Kredibilitas Negara di antara Pebisnis

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan kredibilitas yakni kredibilitas negara dalam menjaga komitmennya. Komitmen yang kredibel terhadap kebijakan, kesepakatan dan penerapan aturan adalah atribut yang penting dalam hubungan negara dan bisnis. Apabila negara tidak menegakkan komitmen terhadap kebijakan, kesepakatan, dan penerapan aturan yang dibuatnya maka hal ini akan membuat adanya rasa tidak percaya pihak bisnis kepada pemerintah dan akan mengarah kepada investasi yang menderita. Keputusan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pihak bisnis tentunya bukanlah keputusan yang mudah, namun dalam membuat keputusan tersebut negara perlu membuat komitmen bahwa apa yang menjadi keputusannya tidak akan berubah, seperti merubah kebijakan, mengingkari kesepakatan, ataupun peraturan (Sen, 2015, p. 9).

Untuk menjaga kredibilitas komitmen terhadap kebijakan, kesepakatan dan penerapan aturan, selama ini pemerintah Korea Selatan adalah salah satu contoh pemerintahan yang dapat menjaganya, terbukti dengan masih adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan bisnis hingga saat ini, termasuk pada pemerintahan Moon Jae-in. Telah diketahui bahwa yang menjadi motif Moon Jae-in dalam memberikan bantuan pada Chaebol untuk menghadapi masalah sanksi Tiongkok adalah menjadikan

Chaebol sebagai mitra untuk mencapai inisiasinya membangun hubungan baik dengan Korea Utara dan menciptakan lapangan kerja di Korea Selatan.

Demi menjaga kredibilitas komitmen atas kebijakan yang diambilnya ini, Moon Jae-in baru-baru ini membuktikan komitmennya dalam berhubungan baik dengan Chaebol. Dalam kunjungan tiga harinya ke Pyongyang pada pertengahan September 2018, Moon Jae-in diketahui ditemani oleh rombongan para pemimpin bisnis Korea Selatan, beberapa diantaranya yaitu Lee Jae-yong yang merupakan pewaris bisnis Samsung Electronics, Koo Kwang-mo ketua LG Corp, Chey Tae-Won ketua SK Group, Kim Young-hwan wakil ketua Hyundai Group, dan lain sebagainya (Song, 2018). Lee dan rombongan lainnya diketahui telah bertemu dengan Ri Ryong-nam yang merupakan wakil perdana menteri Korea Utara untuk urusan ekonomi (Suzuki, 2018).

Usaha Moon Jae-in untuk mengikutsertakan para pemimpin bisnis pada kunjungannya ke Pyongyang ini, selain untuk menjaga kredibilitas komitmen atas keputusannya berhubungan baik dengan Chaebol, Moon Jae-in juga melakukannya untuk pendekatan dengan Korea Utara. Presiden Moon Jae-in percaya bahwa dengan kehadiran para pemimpin bisnis dalam pertemuan tersebut akan membantu prospek investasi bisnis Korea Selatan di Korea Utara dan hal ini akan membantu meyakinkan Pyongyang untuk merealisasikan denuklirisasi (Suzuki, 2018). Selain itu, menurut analisis dari *Samsung Securities*, apabila Korea Selatan menggabungkan kekayaan dan industrialisasinya dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam Korea Utara, hal ini akan membuat lompatan jangka panjang terhadap ekonomi kedua negara.

3.2.4 Membangun Tingkat Kepercayaan Tinggi antara Pemerintah dan Swasta

Kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta adalah salah satu yang terpenting dari hubungan pemerintah dan bisnis. Menurut literatur, kepercayaan ini merupakan faktor kontribusi penting untuk kredibilitas tindakan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan pernyataan pemerintah akan lebih kredibel ketika adanya kepercayaan antara keduanya (Sen, 2015, p. 9).

Sejak masa kampanyenya, Moon Jae-in merupakan sosok yang anti Chaebol dan menganggap bahwa Chaebol merupakan pihak dengan kejahatan yang mengakar pada ekonomi Korea Selatan. Oleh sebab itu, Moon Jae-in menjanjikan bahwa pada pemerintahannya ia akan mereformasi tata kelola Chaebol dan menghapuskan hubungan kolusi antara politik dan bisnis. Adanya pernyataan ini telah menunjukkan bahwa Moon Jae-in tidak memiliki rasa percaya kepada Chaebol. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sikap Moon Jae-in terhadap Chaebol mulai melunak, hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan dari pemerintahannya kepada Chaebol untuk mengurangi adanya dampak dari sanksi Tiongkok.

Rasa percaya Moon Jae-in terhadap Chaebol terus meningkat, terlebih lagi dengan adanya kebijakan Moon Jae-in yang menginisiasi perdamaian dengan Korea Utara. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa untuk mendukung inisiasi perdamaian Korea Selatan dengan Korea Utara, Moon Jae-in diketahui telah menggandeng para pebisnis termasuk Chaebol untuk berinvestasi di Korea Utara. Tidak hanya berhenti disitu saja, beberapa waktu yang lalu Moon Jae-in diketahui telah mendesak parlemen untuk menyetujui undang-undang yang

memungkinkan Chaebol untuk memiliki saham “*internet bank*” hingga 34 persen dan angka ini 4 persen lebih jauh dari batas atas saat ini (Chandran, 2018).

3.3. Analisis penyelesaian permasalahan sanksi Tiongkok atas Penempatan THAAD antara Korea Selatan dan Tiongkok

Adanya penempatan THAAD di Korea Selatan telah memicu reaksi dari Tiongkok yang kemudian berlanjut dengan adanya sanksi yang diterapkan oleh pihak Tiongkok. Dalam menyelesaikan permasalahan ini penulis akan menggunakan konsep *Issue Linkage* menurut Ernst B. Haas. Konsep ini merupakan cara untuk menawarkan perjanjian oleh dua aktor (negara) dengan melibatkan lebih dari satu isu untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai. Adapun proses *issue linkage* dalam permasalahan ini bermula pada; *Pertama*, pembahasan ini bermula dari Tiongkok yang pada awalnya merasa bahwa dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan akan mengancam isu keamanan pada negaranya. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa isu keamanan merupakan hal pertama yang memulai adanya sanksi. *Kedua*, tidak adanya respon yang diberikan oleh Korea Selatan akhirnya membuat Tiongkok menerapkan sanksi pembalasan yang justru lebih mengarah kepada isu ekonomi, salah satunya yakni dengan memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan di Tiongkok. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Tiongkok menghubungkan isu keamanan dengan ekonomi. Dengan demikian telah terjadi adanya ujicoba dari linker yaitu Tiongkok, terhadap linkee yaitu Korea Selatan.

Ketiga, setelah adanya upaya menghubungkan isu keamanan ke ekonomi, maka Tiongkok menghubungkan kembali ke sektor keamanan. Dalam hal ini Tiongkok telah

menawarkan adanya negosiasi, hingga terjadilah pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Xi Jinping dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang dilaksanakan di Vietnam pada pertengahan bulan November 2017. Dalam pertemuan tersebut Xi Jinping menawarkan 3 jaminan yang harus di sanggupi oleh Moon Jae-in apabila menginginkan kembalinya rasa percaya Tiongkok pada Korea Selatan dan mencabut sanksi Tiongkok yang diberikan pada Korea Selatan atas penempatan THAAD. 3 jaminan tersebut yakni “*three no’s*” yang berisi antara lain; 1) Korea Selatan tidak akan melanjutkan penempatan THAAD (*no additional THAAD deployment*); 2) Korea Selatan tidak akan mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat lainnya (*no use of other US missile defense systems*) dan; 3) Korea Selatan tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi Amerika Serikat dan Jepang (*no joining an alliance with US and Japan*) (Panda, 2017).

Dengan adanya tiga jaminan ini menunjukkan bahwa telah terjadi adanya barter kembali, dari isu ekonomi yaitu sanksi pembalasan atas penempatan THAAD kepada isu keamanan yaitu dengan adanya tiga jaminan. Dengan kata lain telah terjadi perjanjian antara Linker dan Linkee. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyelesaian pasca sengketa antara dua negara.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik garis besar bahwa Pertama, penempatan THAAD oleh Korea Selatan telah menimbulkan reaksi dari Tiongkok. Kedua, reaksi yang didapat oleh Korea Selatan adalah dalam isu ekonomi. Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya pertukaran isu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tiongkok

merupakan Linker dan Korea Selatan adalah Linkee. Ketiga, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tiongkok menawarkan tiga jaminan dalam isu keamanan, hal ini kemudian disepakati oleh Korea Selatan. Dengan demikian adanya barter isu telah memantik sengketa dan juga menyelesaikan masalah.